

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN MASJID MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI
PADA MASJID AL-MUQORROBIN DI DESA PINGGIRPAPAS**

Artikel Skripsi



Oleh :

ARDITA NOVIANA

NPM : 715.2.2.0921

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA SUMENEP
2019**

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN MASJID MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI
PADA MASJID AL-MUQORROBIN DI DESA PINGGIRPAPAS**



Artikel Skripsi
Program Studi : Akuntansi

Diajukan Oleh :
ARDITA NOVIANA
NPM : 715.2.2.0921

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS WIRARAJA

2019

SUMENEP

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 02 September 2019

IMAM DARUL FIRMANSYAH, S.E.,M.Ak

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARDITA NOVIANA

NPM : 715220921

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Akuntansi

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
MASJID MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI PADA MASJID AL-
MUQORROBIN DI DESA PINGGIRPAPAS”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep

Pada tanggal : 02 September 2019

MATERAI
TIMPEL
Yang menyatakan

54AF3ADF97703257

6000
RUPIAH



(ARDITA NOVIANA)

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN MASJID MELALUI PENDEKATAN FENOMENOLOGI PADA MASJID AL-MUQORROBIN DI DESA PINGGIRPAPAS

Ardita Noviana¹

Imam Darul Firmansyah²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wiraraja

Arditanoviana54@gmail.com

Darul.faradis@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Masjid Al-Muqorrobin. Dan apakah pengelolaan Keuangan yang diterapkan oleh Masjid Al-Muqorrobin sudah akuntabel dan transparan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan para narasumber atau informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan selanjutnya data dianalisis dengan tahapan (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus masjid sudah mengelola keuangan dengan terbuka atau transparan sebagai wujud pertanggungjawaban atau akuntabilitas keuangan masjid dengan melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Pengelolaan keuangan sudah diterapkan dengan tahapan-tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Keuangan

Accountability and Transparency in Mosque Financial Management Through the Phenomenological Approach of the Al-Muqorrobin Mosque in Pinggirpapas Village

Abstract

This study aims to find out how financial management is applied by the Al-Muqorrobin Mosque. And whether the financial management implemented by the Al-Muqorrobin Mosque is accountable and transparent. The study was conducted using qualitative methods with a phenomenological approach. The data source used is the primary data source that is data obtained directly from interviews with informants or informants. Data collection techniques used by observation, interview and documentation. And then the data are analyzed by stages (1) data reduction, (2) data presentation, and (3) conclusion drawing. The results showed that the mosque management had managed finances openly or transparently as a form of accountability or mosque's financial accountability by recording cash receipts and disbursements. Financial management has been implemented in stages, namely planning, implementation, supervision and accountability.

Keywords: *Accountability, Transparency, Financial Management*

Pendahuluan

Organisasi keagamaan adalah formasi nirlaba, dikarenakan formasi tersebut berdiri dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Pesatnya perkembangan umat Islam serta masjid di Indonesia, sehingga dana untuk keperluan dalam membantu berbagai kegiatan serta biaya operasional masjid menjadi lebih banyak. Hal itu dibutuhkan guna membantu kegiatan peribadatan, keagamaan, sarana dan prasarana, serta membangun dan membenah masjid itu sendiri, jadi sudah seharusnya masjid sebagai formasi nirlaba juga diperhatikan terkait pencatatan dan pengelolaan keuangan.

Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti tentang “Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Melalui Pendekatan Fenomenologi Pada Masjid Al-Muqorrobindi Desa Pinggirpapas”. Penulis akan menguji kembali akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di masjid tersebut. Banyak isu yang beredar bahwa keuangan di masjid tersebut kurang terbuka bagi masyarakat atau belum sepenuhnya transparan. Dan menurut survei yang peneliti lakukan sendiri, di Masjid tersebut memang tidak memberikan rincian pengelolaan keuangan untuk dipublikasikan kepada masyarakat. Namun, keterbukaan tersebut dianggap perlu oleh warga desa pinggirpapas dikarenakan warga juga punya rasa keingintahuan terhadap penyaluran sumber dana yang diperoleh masjid. Dengan adanya isu tersebut maka penulis berasumsi bahwa akuntabilitas pada pengelolaan keuangan Masjid Al-Muqorrobin di desa pinggirpapas begitu sangat kurang sehingga di perlukan adanya penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi. Karena tingkat transparansi yang tinggi juga akan menambah tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan di masjid tersebut.

Banyak masyarakat sekitar dan donatur dari berbagai kalangan yang menyumbangkan dananya pada masjid. Mereka mempercayakan uangnya dengan ikhlas, tapi apakah semua itu disalurkan secara benar dan tepat? Inilah yang ingin diketahui oleh masyarakat. Karenaitulah, dalam hal ini para pengurus masjid atau takmir masjid dituntut untuk memprioritaskan pertanggungjawaban informasinya karena menyangkut kepentingan elemen individu yang lebih banyak. Salah satu bentuk pertanggungjawaban itu adalah diperlukannya sebuah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di masjid tersebut.

Dengan latar belakang guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan masjid Al-Muqorrobin di Desa Pinggirpapas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

sekitar dan donatur terhadap laporan keuangan masjid. Karena laporan keuangan harus dilakukan dengan benar guna meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan transparansi laporan keuangan.

Tinjauan Pustaka

A. Akuntabilitas

Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang . Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas atau *accountability* adalah kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan. Banyak ayat Al-quran yang menjelaskan proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah di muka bumi. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak yang terikat. Wujud pertanggungjawaban biasanya dalam bentuk laporan akuntansi (Amrin, 2009).

B. Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:20). Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberikan amanah.

Pola pertanggungjawaban sektor publik bersifat vertikal dan horizontal. Pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah daerah di atasnya atau kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada parlemen. Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Kedua jenis pertanggungjawaban sektor publik tersebut merupakan elemen penting dari proses akuntabilitas publik (Mardiasmo, 2018).

C. Transparansi

Merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad, 2007) dalam (Kusuma, 2012). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan atau pertanggungjawaban pihak pemegang amanah untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Kalaupun ada informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, yang sering disebut dengan rahasia perusahaan, maka harus ada kriteria yang jelas untuk itu. Keterbukaan juga bisa berarti informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para *stakeholders* yang membutuhkan. Dengan demikian, jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses, maka praktek penyelenggaraan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi (Mita, 2009) dalam (Ardhiyanti, 2013).

D. Pengelolaan Keuangan

Menurut (Syarifudin, 2005) dalam (Nurjannah, 2018) pengelolaan keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pemimpin dalam menggerakkan bawahannya yang bertugas dalam bidang keuangan untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan atau penganggaran, pencatatan, pengeluaran serta pertanggungjawaban.

Merupakan segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan

yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah organisasi pada kurun waktu tertentu. Dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat optimal.

Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Riset disini berupa kualitatif dengan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, penyimpanan, penggunaan, pencatatan serta pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan) terhadap siklus keluar masuknya dana atau uang dalam sebuah organisasi pada kurun waktu tertentu. Dengan dilakukannya setiap tahapan dalam pengelolaan keuangan maka fungsi dasar dan tujuan dari pelaksanaan pengelolaan keuangan dapat optimal.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Maret-Juni 2019. Sedangkan untuk tempat penelitian adalah di Masjid Al-Muqorrobin Jl. Adi Sucipto 01 Dusun Kauman RT.001 RW.001 Desa Pinggirpapas Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep.

C. Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dokumenter berupa hasil foto yang didapat dari tempat penelitian serta dokumen pendukung lainnya dari informan.

2) Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dengan para narasumber atau informan. Informan tersebut adalah takmir masjid, remaja masjid dan jama'ah masjid.

D. Informan

Terdapat dua jenis informan yang digunakan dalam proses penelitian ini, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Berkenaan dengan informan kunci yang terpilih yakni pengurus masjid yaitu Bapak H. Agus Syarif selaku ketua masjid dan Bapak H. Hosen selaku bendahara masjid. Sedangkan untuk informan pendukung yang peneliti pilih adalah jama'ah masjid.

E. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Disini peneliti mencatat langsung gejala-gejala yang ditemukan atau terjadi di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai sebuah acuan untuk yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Observasi dilakukan dengan melihat langsung situasi atau kondisi lingkungan masjid dan sekitar lingkungan Masjid Al-Muqorrobin.

2) Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara kombinasi, dimana wawancara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya, akan tetapi dalam hal ini peneliti juga bebas melakukan improvisasi dengan menanyakan informasi lain. Dengan wawancara ini diharapkan dapat memberikan data yang lebih mendalam.

3) Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data atau mengevaluasi catatan-catatan seperti laporan kegiatan maupun dalam bentuk data keuangan masjid. Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan alat berupa handphone yang berfungsi sebagai alat perekam untuk dokumentasi audio, gambar maupun video, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti:

1. Data sejarah berdirinya Masjid Al-Muqorrobin.
2. Struktur organisasi Masjid Al-Muqorrobin.
3. Data aktivitas operasional Masjid Al-Muqorrobin.
4. Dan data keuangan Masjid Al-Muqorrobin.

F. Teknik Analisis Data

1) Tahap Reduksi Data

Adapun reduksi data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti mengumpulkan dan menelaah data-data atau catatan hasil wawancara dengan para narasumber tentang bagaimana akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh Masjid Al-Muqorrobin tersebut.

2) Tahap Penyajian Data

peneliti memaparkan hasil dari reduksi data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber. Pada langkah ini peneliti melakukan analisis hasil

wawancara dan review dokumen, untuk mengetahui praktek akuntabilitas dan wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh masjid tersebut.

3) Tahap Penarikan Kesimpulan

Adapun penarikan kesimpulan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peneliti menyimpulkan hasil data yang diperoleh dari penyajian data. Pada tahap ini peneliti membuat kesimpulan secara menyeluruh mengenai praktek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan yang telah dijalankan oleh masjid.

G. Uji Keabsahan Data

Alat uji yang akan digunakan peneliti dalam menguji keabsahan data yakni dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi yang dimaksud dalam penelitian ini yakni memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu di luar data guna membandingkan antara data dengan data yang lain. Teknik yang digunakan yakni dengan pengecekan melalui sumber lain.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengelolaan Keuangan Pada Masjid Al-Muqorrobin di Desa Pinggirpapas

1) Perencanaan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan untuk perencanaan jangka pendek seperti perencanaan untuk tiap bulannya, panitia tidak membuat perencanaan. Di Masjid Al-Muqorrobin pencatatan keuangannya masih manual yaitu ditulis tangan jadi panitia hanya menulis dari donatur sekian, dari celengan sekian, dari kotak amal sekian, itu dalam satu kertas tidak dibeda-bedakan. Jadi setiap bulannya untuk membayar air dan listrik menggunakan kas tersebut.

Untuk perencanaan jangka panjang, sumber dana masjid sendiri yang berasal dari donatur, celengan masjid, dan kotak amal masjid sebesar 1,3M. Semua dana tersebut direncanakan digunakan untuk pembangunan masjid seperti untuk membayar tukang, membeli semen, membeli besi, membeli pasir, dan membeli bahan-bahan lainnya. Selain dari donatur, celengan masjid, dan kotak amal masjid, para panitia juga sudah merencanakan membuat proposal untuk bantuan dana kepada pemprov jawa timur yaitu sebesar Rp. 250.000.000. Dan dijanjikan akhir bulan juli sudah bisa dicairkan. Bantuan dana tersebut direncanakan akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan masjid Al-Muqorrobin yaitu untuk pekerjaan persiapan, pekerjaan atap, pekerjaan pintu, jendela dan penggantung, pekerjaan plafond dan pekerjaan lain-lainnya.

Sebagaimana penelitian di atas secara keseluruhan informan-informan yang peneliti wawancarai untuk perencanaan pengelolaan keuangan masjid sudah diterapkan di Masjid Al-Muqorrobin. Dan data yang peneliti dapat sudah sesuai dengan teori yang ada bahwa;

Menurut (Senduk, 2000) Perencanaan adalah proses merencanakan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Pencapaian tujuan tersebut ada yang dalam bentuk menabung, melakukan investasi, melakukan budgeting, atau mengatur komposisi harta yang dimiliki saat ini.

Sehingga perencanaan pengelolaan keuangan masjid sangat penting untuk dilakukan karena dalam organisasi masjid, pengelolaan keuangan dan administrasi merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola keuangan masjid. Jika perencanaan pengelolaan keuangan masjid dapat dilaksanakan dengan baik, itu pertanda pengurus masjid adalah orang yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab. Akan tetapi jika perencanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tidak baik, maka akan berakibat timbulnya fitnah dan pengurusnya akan dinilai sebagai orang yang tidak dapat dipercaya dan bertanggungjawab.

2) Pelaksanaan

Dari hasil wawancara dengan informan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan masjid ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan masjid sudah bisa dikatakan 70% sudah terlaksana. Untuk saat ini pembangunan masjid dihentikan karena kekurangan dana. Dan masih menunggu bantuan dana yang dijanjikan oleh pemprov Jawa Timur untuk dilanjutkan pembangunannya. Apabila bantuan dana dari pemprov Jawa Timur sudah cair, pembangunan masjid bisa dilaksanakan 100%. Bantuan dana tersebut dijanjikan akhir bulan Juli sudah bisa dicairkan.

Sebagaimana penelitian di atas secara keseluruhan informan-informan yang peneliti wawancarai, untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan di Masjid Al-Muqorrobin sudah diterapkan. Dan data yang peneliti dapat sudah sesuai dengan teori yang ada bahwa:

Pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan keputusan, dan sebagainya). Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaksanaan>.

Sehingga pelaksanaan pengelolaan masjid sangat penting untuk dilakukan agar sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

3) Pengawasan

Dari hasil wawancara dengan informan dalam hal pengawasan pengelolaan keuangan di Masjid Al-Muqorrobin yang bertanggungjawab mengawasi adalah ketua masjid yaitu Bapak H. Agus Syarif. Sementara bendahara dan wakil bendahara hanya bertugas dalam hal pencatatan keuangan masjid saja dan melaporkan setiap bulannya tentang kondisi keuangan masjid. Jadi, setiap bulannya dilakukan pelaporan pengeluaran kas yaitu kas digunakan untuk pembelian bahan bangunan bulan ini total sekian, dan seterusnya. Hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran dana masjid lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Untuk saat ini, pembangunan masjid sendiri sudah mencapai 70%, dan dihentikan karena kekurangan dana. Apabila bantuan dana dari pemprov jawa timur sudah bisa dicairkan, maka pembangunan masjid akan dilanjutkan sehingga terselesaikan 100%.

Sebagaimana penelitian di atas secara keseluruhan informan-informan yang peneliti wawancarai untuk pengawasan pengelolaan keuangan di Masjid Al-Muqorrobin sudah diterapkan. Dan data yang peneliti dapat sudah sesuai dengan teori yang ada bahwa:

Menurut(Ruky, 2002) pengawasan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan (dalam proses manajemen) berjalan mengikuti rencana yang telah ditetapkan dan menuju kepada sasaran yang harus dicapai.

Sehingga pengawasan pengelolaan keuangan masjid sangat penting dilakukan untuk menjaga agar penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dan dapat memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

4) Pertanggungjawaban

Dari percakapan bersama salah satu narasumber (informan) berkesimpulan,yakni bentuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh Masjid Al-Muqorrobin adalah dalam bentuk laporan keuangan. Namun, laporan keuangan yang dibuat masih manual dan sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Meskipun sederhana, tetapi dalam

mencatat pemasukan dan pengeluarannya ditulis secara rinci agar bisa dipertanggungjawabkan kepada jamaah dan masyarakat. Biasanya diumumkan atau ditempel di mading masjid berupa total kas minggu ini sekian, ditambah total kas minggu lalu sekian dan dijumlahkan. Untuk pengeluaran kas sendiri biasanya ditulis total pengeluaran kas minggu ini sekian.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sangat penting diterapkan karena apabila dalam pengelolaan keuangan masjid para pengurus sudah baik dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, maka hal ini juga akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan jama'ah. Tujuan dari pertanggungjawaban sendiri adalah untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahamanan antara pengurus dengan jamaah dan masyarakat.

Sebagaimana teori yang dikatakan oleh (Silvia dan Anzar, 2011) dalam (Ardhiyanti, 2013) bahwa pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah merupakan perwujudan kewajiban yang diamanahkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dan menjelaskan realisasi otoritas yang diperoleh sesuai dengan misi organisasi.

Sehingga pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sangat penting diterapkan karena apabila dalam pengelolaan keuangan masjid para pengurus sudah baik dalam mempertanggungjawabkan tugasnya, maka hal ini juga akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dan jama'ah. Tujuan dari pertanggungjawaban sendiri adalah untuk menghindari akan terjadinya kesalah pahamanan antara pengurus dengan jamaah dan masyarakat.

B. Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Muqorrobin di Desa Pinggirpapas

Dari hasil wawancara tentang tanggung jawab dalam mengolah keuangan ditemukan bahwa Masjid Al-Muqorrobin sudah akuntabel dalam hal pencatatan keuangan. Karena dalam hal ini panitia sudah membuat pencatatan keuangan, meskipun pencatatan keuangan yang dibuat masih manual dan sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Namun, dalam hal ini panitia sudah berusaha sebaik mungkin setiap ada pemasukan dan pengeluaran dicatat serinci-rincinya agar bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan jamaah masjid. Dalam hal pertanggungjawaban biasanya diumumkan setiap sholat jum'at, atau ditempel di madding masjid. Biasanya ditulis total kas minggu lalu sekian, ditambah total

kas minggu ini sekian dan dijumlahkan. Dan untuk pengeluaran kas biasanya ditulis total pengeluaran kas minggu ini sekian.

Sebagaimana teori yang dikatakan oleh (Ebrahim, 2003) dalam (Siskawati, Surya, & Ferdawati, 2015) bahwa Akuntabilitas dapat menjadi *tool* (alat) atau *process* (proses). Sebagai alat akuntabilitas dapat dilakukan secara berulang-ulang, memiliki wujud dan bentuk, untuk jangka waktu yang terbatas. Contoh akuntabilitas sebagai alat yaitu laporan dan pengungkapan. Laporan dan pengungkapan dapat dibuat dan dilakukan secara berulang-ulang seperti bulanan, triwulan atau kuartal. Bentuk dan wujud dari laporan dapat berupa laporan keuangan yang disajikan untuk memperlihatkan evaluasi kinerja selama jangka waktu tertentu. Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (*accountability*) selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khaliq mulai dari alam kandungan.

Untuk akuntabilitas yang diberikan kepada pengurus dan jamaah yang berada dilingkungan masjid adalah pencatatan keuangan yang jujur, jelas dan akuntabel meskipun masih dalam bentuk pencatatan keuangan yang sederhana. Dimana salah satu wujud dari penerapan akuntabilitas maupun transparansi adalah dengan dibuatnya laporan keuangan masjid. Laporan keuangan masjid disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Sehingga dalam hal ini akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sangat penting diterapkan karena pertanggungjawaban keuangan sangat diperlukan dan sangat disarankan dapat tersampaikan kemasyarakat secara merata dan adil sehingga seluruh informasi terkait pengelolaan keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas dan dengan hal itu pula dapat mencerminkan pertanggungjawaban kemasyarakat telah terlaksana dengan baik.

C. Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Al-Muqorrobin di Desa Pinggirpapas

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan ditemukan bahwa dalam hal transparansi di Masjid Al-Muqorrobin sudah transparan kepada jamaah dan masyarakat. Hanya saja dalam pelaporan dan penyampaian pencatatan keuangan masjid, panitia menyampaikan secara lisan dan ditempel di mading masjid pada saat sholat jum'at. Namun dalam hal ini panitia hanya menyampaikan totalnya saja, tidak secara rinci.

Sebagaimana teori yang dikemukakan oleh (Hamid Muhammad, 2007) dalam (Kusuma, 2012) bahwa transparansi berarti keterbukaan (*openses*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan

sumber daya publik. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan yang diambil oleh pemerintah.

Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para *stakeholders* yang membutuhkan. Dengan demikian, jika segala aspek proses penyelenggaraan pelayanan dipublikasikan secara terbuka sehingga mudah diakses, maka praktek penyelenggaraan itu dapat dinilai memiliki transparansi yang tinggi.

Namun berdasarkan penuturan dari salah satu jamaah masjid, yaitu Bapak Jaelani, panitia atau pengurus masjid Al-Muqorrobin dalam hal transparansi selama ini sudah cukup baik namun masih kurang optimal dalam penyampaian informasi, karena penyampaian informasi keuangan hanya disampaikan hanya total pengeluaran dan total kas saja tidak terperinci, sehingga para jamaah tidak bisa melihat secara detail informasi keuangan Masjid Al-Muqorrobin.

Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Bapak Anton selaku jama'ah masjid, bahwa untuk melihat secara langsung pencatatan keuangan masjid belum pernah. Karena biasanya diumumkan saat sholat jum'at dan ditempel oleh panitia masjidnya hanya total kas dan total pengeluaran saja tidak terperinci.

Sehingga transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting diterapkan karena penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. Selain itu dengan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan juga dapat menambah wawasan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.

Simpulan

- 1) Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan adalah segala bentuk kegiatan administratif yang dilakukan dalam bentuk beberapa tahapan yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban (pelaporan). Di Masjid Al-Muqorrobin tidak membuat perencanaan jangka pendek. Namun, membuat perencanaan jangka panjang yaitu perencanaan dana untuk pembangunan masjid. Dana yang berasal dari donatur, celengan masjid dan kotak amal masjid terkumpul 1,3M. Dana tersebut direncanakan untuk pembangunan masjid. Begitupun dengan bantuan dana yang diberikan oleh Pemprov

jawa timur yaitu sebesar Rp. 250.000.000 yang juga akan digunakan untuk proses lanjutan pembangunan masjid.

- 2) Untuk pelaksanaannya saat ini pembangunan Masjid Al-Muqorrobin sendiri sudah terselesaikan sampai 70%, masih belum bisa dilanjutkan karena dana yang terkumpul sebesar 1,3M sudah habis. Bisa diselesaikan menjadi 100% apabila bantuan dana yang dijanjikan oleh pemerintah sudah bisa dicairkan.
- 3) Untuk pengawasan atau kontroling yang bertanggungjawab mengawasi adalah ketua masjid yaitu Bapak H. Agus Syarif. Setiap bulannya dilakukan pelaporan pemasukan dan pengeluaran kas seperti kas digunakan untuk pembelian bahan bangunan bulan ini sekian, dan seterusnya. Hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran dana masjid lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan nantinya.
- 4) Yang terakhir untuk pertanggungjawaban yang dibuat oleh panitia adalah dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat masih manual yaitu hanya ditulis tangan dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran saja.
- 5) Akuntabilitas di Masjid Al-Muqorrobin sudah akuntabel dalam hal pencatatan keuangan. Karena dalam hal ini panitia sudah membuat pencatatan keuangan, meskipun pencatatan keuangan yang dibuat masih manual dan sederhana yaitu hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran saja. Namun, dalam hal ini panitia sudah berusaha sebaik mungkin setiap ada pemasukan dan pengeluaran dicatat serinci-rincinya agar bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan jamaah masjid. Dalam hal pertanggungjawaban biasanya diumumkan setiap sholat jum'at, atau ditempel di mading masjid. Biasanya ditulis total kas minggu lalu sekian, ditambah total minggu ini sekian dan dijumlahkan. Dan untuk pengeluaran biasanya ditulis total pengeluaran kas minggu ini sekian.
- 6) Dalam hal transparansi di Masjid Al-Muqorrobin sudah transparan atau terbuka kepada jamaah dan masyarakat dengan melaporkan keuangan masjid setiap sholat jum'at. Hanya saja dalam pelaporan dan penyampaian pencatatan keuangan masjid, panitia menyampaikan secara lisan dan ditempel di mading masjid pada saat sholat jum'at. Namun dalam hal ini panitia hanya menyampaikan totalnya saja, tidak secara rinci.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yakni dalam melakukan wawancara peneliti kurang aktif dalam mengembangkan pertanyaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi yang

dibutuhkan, begitu pula dari informan juga kurang begitu baik dalam menyampaikan informasi yang mereka ketahui.

Keterbatasan yang kedua adalah keterbatasan waktu yaitu dimana bantuan dana yang diberikan oleh pemprov jawa timur dijadwalkan akhir bulan juli bisa dicairkan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sudah dilakukan di bulan juli.

Saran

Penulis berharap untuk penelitian selanjutnya dilakukan penelitian yang lebih dalam lagi, baik dari segi wawancara kepada informan maupun pengolahan data dengan referensi yang lebih banyak. Agar informasi yang dibutuhkan oleh peneliti lebih banyak dan bisa dikembangkan.



DaftarPustaka

- Amrin, A. (2009). *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Ardhiyanti, A. (2013). Akuntabilitas dan Transparansi Pada Panti Asuhan (Studi Kasus pada Panti Asuhan Darul Hadlanah NU Salatiga).
- Kusuma, M. (2012). Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Transparansi Penyusunan Laporan Keuangan Pmerintah Daerah (Studi Empiris Terhadap Persepsi Mahasiswa Diploma Akuntansi di Kediri), 2(2), 45–57.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. (Mardiasmo, Ed.) (Terbaru). Yogyakarta: ANDI.
- Nurjannah. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid: PSAK NO. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Pada Masjid Al-Markaz Al-Islami Jenderal M. Jusuf)*.
- Ruky, A. S. (2002). *Sukses Sebagai Manajer Profesional Tanpa Gelar MM atau MBA*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Senduk, S. (2000). *Seri Perencanaan Keuangan Keluarga : Mengelola Keuangan Keluarga*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Siskawati, E., Surya, F., & Ferdawati. (2015). Model Akuntabilitas Organisasi Non Profit pada Masjid.